

Syarikat dan Eksperimentasi Rekonsiliasi Kulturalnya

(Sebuah Pengamatan Awal)



Farid Wajidi
 Sekretaris Yayasan LKiS,
 Yogyakarta. Sekarang sedang
 menjadi Ph.D fellow pada
*International Institute for the
 Study of Islam in the Modern
 World (ISIM)*, Leiden, Belanda,
 dalam kerangka proyek penelitian
 "Indonesia in Transition"

Bertukar Ingatan, Membongkar Stigma

Jarum jam menunjukkan pukul 10.00 pagi ketika sejumlah orang yang dikenal sebagai 'eks-PKI' mulai berdatangan ke sebuah pesantren yang terletak di pinggiran kota Jepara. Bagi kebanyakan mereka, datang ke pesantren boleh jadi seperti sebuah perjalanan panjang. Karena, begitu jauhnya jarak religius-kultural (berserta rasa keterasingan, trauma, dan stigmatisasi) yang terbangun antara mereka dan kaum santri sejak tragedi 1965 yang membawa penderitaan tak berkesudahan itu. Penderitaan demi

penderitaan harus dipikul, bahkan juga oleh anggota keluarga dan keturunan mereka. Itupun masih diberati beban tambahan berupa tertutupnya seluruh ruang bahkan untuk sekadar menceritakannya pada orang lain. Namun, hari itu seperti menjanjikan sesuatu yang lain. Mereka sepakat untuk saling memper-tukarkan (sekaligus mungkin membongkar) ingatan tentang tragedi itu bersama kelompok Islam santri yang tercatat sebagai salah satu pihak "pelaku" dan mencoba menatap hidup dengan cara baru, tanpa dendam, tanpa stigmatisasi dan diskriminasi.

Kegiatan mediasi korban-pelaku Tragedi '65 tingkat kota hari itu hanyalah salah satu dari rangkaian panjang kegiatan Rekonsiliasi Kultural yang digagas sekelompok anak muda NU yang tergabung dalam jaringan Masyarakat Santri Untuk Advokasi Rakyat (Syarikat). Sebelum sampai ke tahap ini, sejumlah aktifis ber-tandang dari pintu ke pintu, mendengar-kan 'ingatan' dan 'pengalaman' masing-masing tentang tragedi itu, menunjuk-kan empati, membuka pembicaraan tentang kemungkinan rekonsiliasi, lalu meng-organisir beberapa pertemuan awal yang lebih terbatas di tingkat RW, desa, atau

kecamatan.

Bertempat di ruang tamu rumah kiai yang terletak di tengah kompleks pesantren, acara dimulai setelah terkumpul sekitar 25 orang. Sebagian besar mereka adalah para korban yang umumnya berusia sepuh, 3 orang tokoh NU lokal, dan sejumlah anak muda yang dengan sabar sudah bekerja berbulan-bulan. Para peserta duduk melingkar di kursi ruang tamu, sementara beberapa anak muda terpaksa duduk bersila di lantai, karena kursi yang tersedia tidak cukup. Acara dimulai dengan sambutan kiai Nuruddin sebagai tuan rumah. Setelah mengucapkan selamat datang, kiai muda ini berusaha meletakkan pertemuan itu dalam perspektif keislaman dengan menyebutnya sebagai 'silaturrahmi', menyambung tali-persaudaraan. Baginya, silaturrahmi adalah ajaran dasar Islam yang mendorong terus terjalinnya komunikasi yang hidup yang memungkinkan hilangnya prasangka dan dendam, serta mengantarkan kepada penyelesaian masalah bersama. Tentang gagasan rekonsiliasi, dia menyatakan berada dalam posisi yang sama dengan Syarikat. Dia menggarisbawahinya sebagai usaha yang mulia, sambil menekankan bahwa ini bukanlah usaha yang mudah dan bisa dimengerti semua orang. Dia lalu mengungkapkan pengalamannya sendiri



berkaitan dengan gagasan ini. Ceritanya bermula sejak dia menjadi ketua Gerakan Pemuda Ansor DIY beberapa tahun lalu. Saat itu Gus Dur (sapaan akrab KH. Abdurrahman Wahid) atas nama warga

NU menyatakan permohonan maaf atas kekerasan yang telah terjadi terkait dengan tragedi '65 yang merupakan tragedi terburuk dalam sejarah Indonesia. Pernyataan maaf itu segera menjadi kontroversial, banyak yang bereaksi keras terhadapnya. Kontroversi semakin meluas ketika Gus Dur juga mengusulkan pencabutan Tap MPRS/XXV/1966 tentang pembubaran PKI dan Pelarangan Komunisme/Marxisme/Leninisme. Gagasan Gus Dur itu macet, tetapi kiai

muda ini memahami makna penting di baliknya. Sebagai seorang ketua organisasi pemuda yang dicatat sebagai salah satu 'aktor' penting dalam tragedi itu, dia merasa harus menyatakan sesuatu. Sebagai ketua Ansor DIY, dia akhirnya menyatakan pernyataan maaf yang sama atas peristiwa itu, dan kali ini pun dia menuai reaksi bermacam-macam, yang tidak semuanya melegakan. Kiai menutup sambutannya dengan sekali lagi menekankan perlunya kehati-hatian dalam menjalankan gagasan ini. "Saya menyadari ini adalah pekerjaan yang mulia, yang sangat penting secara kemanusiaan, tetapi kita tetap harus berhati-hati agar niat mulia ini tidak justru menimbulkan

masalah baru”, katanya.

Acara dilanjutkan dengan pengantar umum dari Muslim, aktifis FSAS (Forum Studi Agama dan Sosial), Jepara. Dia menjelaskan, kegiatan rekonsiliasi ini merupakan bagian dari program jaringan Syarikat di 18 kota di Jawa. Di Jepara sendiri acara ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan itu diawali dengan penggalan data dan informasi mengenai peristiwa '65, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada para kiai dan pimpinan NU, kepada para saksi sejarah dan para korban, dan akhirnya disusul dengan mediasi antara pelaku dan mereka yang dianggap korban (langsung maupun tidak langsung). Muslim juga menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan lanjutan dari acara yang sudah dilaksanakan di kecamatan Keling beberapa waktu sebelumnya. Dia menyatakan beberapa tokoh NU sebenarnya sudah diundang untuk acara itu, namun beberapa menyatakan tidak bisa hadir karena kesibukan. Hari senin adalah hari paling sibuk bagi para kiai dan pengurus NU di Jepara yang sebagian terlibat dalam bisnis. Para kiai umumnya mendukung gagasan rekonsiliasi, sehingga ketidakhadiran mereka tidak harus mengurangi makna pertemuan bersama itu. Dia berharap pertemuan akan memberi jalan bagi masa depan Indonesia yang baru, demokratis dan anti diskriminatif, namun menyerahkan sepenuhnya kepada para hadirin tentang bentuk dan langkah-langkah yang mungkin akan ditempuh ke arah itu. Semua itu,

menurutnya, harus dimulai dengan mengungkapkan apa yang telah terjadi di masa lalu, bukan dengan maksud menoreh luka lama, tapi justru untuk menyembuhkannya. Karena itu, rangkaian acara pertemuan akan terdiri dari dua tahap: (1) pengungkapan pengalaman, dan (2) pembahasan langkah-langkah ke arah rekonsiliasi berkelanjutan. Muslim meminta masing-masing hadirin memperkenalkan diri, dengan mengungkapkan nama, posisi pada peristiwa '65, bagaimana pengalamannya, pekerjaan sekarang, dan harapan-harapan atas pertemuan ini. Perkenalan dilakukan bergiliran mengikuti urutan posisi duduk masing-masing.

Orang pertama yang memperkenalkan diri bernama Sutarman (67). Dia lahir di kecamatan Keling, sekarang tinggal di Mayong, Jepara, Kedua orang tuanya meninggal saat dia masih sangat kecil, dia diasuh dan didik oleh seorang yang bernama Sumarto hingga dewasa dan mendapat pendidikan yang baik. Tahun 1957-1961, dia bekerja sebagai mantri di Jepara, kemudian pindah ke Semarang dan bekerja di sebuah Balai Pengobatan Swasta. Setelah peristiwa 1965, perusahaannya diambil alih, dan akhirnya bubar. Dia disurati ayah angkatnya, Sumarto, yang saat itu pejabat Wedono Tayu, yang meminta tinggal bersamanya di Tayu. Tapi di sinilah dia ditangkap karena mempunyai kartu anggota Serikat Buruh Kesehatan. Dia tertangkap dalam sebuah razia KTP di stasiun Tayu, dibawa ke Kamp Pakis, yang terkenal sebagai kamp

maut, sebelum akhirnya dikirim ke Pati. Di Pati dia disuruh kerja bakti di asrama Brimob dan membangun Aula Kodim. Berikutnya, dia dikirim ke Nusakambangan, sebelum diberangkatkan ke pulau Buru 3 bulan kemudian. Di sana dia kerja paksa selama 9 tahun, hingga dibebaskan pada bulan Desember 1978. Sutarman bercerita tentang hidupnya yang sangat susah meski sudah bebas. Tapi agaknya dia sudah mampu mengatasi sebagian traumanya. Kini dia melihat pengalamannya dalam jarak. Baginya sekarang, peristiwa '65 adalah musibah. Musibah itu ada yang dari manusia, ada yang dari Tuhan. Sebagai musibah oleh manusia, semua harus diselesaikan bersama agar tidak ada lagi dendam kesumat, hingga kembali seperti sebelum ada peristiwa. Karena itu, dia menyambut gagasan FSAS, dan berharap semuanya berjalan lancar.

Pembicara berikutnya adalah Rujito. Pagi itu dia datang dengan jaket hijau tua, berlambang almamaternya, Islamic Mission Centre, Jakarta, berpeci hitam. Dia memulai pembicaraan dengan kalimat pembuka panjang berbahasa Arab, seperti pada pembukaan khutbah Jum'at. Pada saat peristiwa '65, Rujito berumur 17 tahun. Dia ditangkap, dan discreening di Gudang Kacang, Jepara. Dia mengaku belum pernah kenal dengan organisasi apapun saat itu (meski dalam pembicaraan dia tampak bersimpati pada pandangan PKI tentang solidaritas sosial), namun dia dituduh menyimpan 16 pucuk senjata api. Dia dipukuli tentara dengan buntut ikan Pari dari jam 09.00 hingga 13.00, sambil

dijemur beralaskan seng di bawah terik matahari di depan Kodim. Dia disuruh mengakui memiliki 16 senjata, tapi tidak mungkin diturutinya karena, kalau mengakui, akan disuruh menunjukkannya, padahal dia tidak pernah memilikinya. Dia sempat dibebaskan setelah ditahan beberapa lama. Tetapi pada 1970, dia kembali ditahan karena dituduh terlibat gerakan PKI gaya baru di Blitar Selatan. "Jadi, orang yang disiksa pada tahun '65 itu belum tentu orang PKI!", katanya. Dia lalu menyebut Haji Sahli yang tinggal di dekat terminal Jepara, yang juga disiksa bersamanya, sebagai contoh lain. Rujito juga mengungkapkan banyak pembelokan cerita saat itu. Salah satunya adalah cerita tentang Carik Kardoyo di Jeruk Wangi. Carik itu dibunuh massa, tetapi cerita yang tersebar adalah "Kiai Haji Kardoyo dari Jeruk Wangi dibunuh orang-orang PKI".

Bebas dari tahanan, Rujito merantau ke Jakarta untuk kuliah di jurusan Sosial Politik di PTDI pimpinan Letkol Hamidi. Namun, malangnya, setelah peristiwa Tanjung Priok 1984, perguruan ini dibubarkan. Rujito pindah ke jurusan Hukum di Islamic Mission Centre, Jakarta, dan berhasil memperoleh gelar SH. Meski sudah bergelar sarjana dari sebuah perguruan tinggi Islam, dia tidak bisa memanfaatkan ijazahnya untuk bekerja, karena statusnya yang eks-tapol. Dia tidak menceritakan bagaimana dia menopang hidupnya sehari-hari, tetapi tampak jelas bahwa kehidupan ekonominya morat-marit.

Rekonsiliasi, menurut Rujito, seharusnya bukanlah semata-mata minta maaf, bersalaman namun masih ada dendam di hati. Dia berharap dendam itu tidak ada lagi, dan meminta NU dan Syarikat mengusahakan rekonsiliasi ini sampai pada perubahan kebijakan di tingkat nasional. Dia berharap diskriminasi terhadap orang-orang yang dianggap terlibat PKI dihapuskan, termasuk hambatan bagi anak-cucu PKI untuk menjadi pegawai negeri atau sekadar pegawai kelurahan. Dia juga meminta agar gagasan rekonsiliasi ini disosialisasikan sampai ke tingkat bawah, karena sebagian orang NU di tingkat ranting masih diskriminatif, memandang rendah orang-orang eks-tapol. Tapi dia mengaku tidak dendam pada orang-orang NU. "Saya sendiri tahu orang-orang NU pada saat itu ditunggangi oleh orang-orang yang ingin merebut kekuasaan dari Soekarno. Tapi saat itu tidak tanggap, karena dianggap PKI tidak bertuhan. Padahal, ajaran komunis itu baik. Intinya gotong royong. Jadi, *habl min al-nâs*". Sebelum menutup pembicaraan, dia juga meminta agar Buletin RUAS milik Syarikat juga disebar lebih banyak ke kalangan NU sendiri, bukan hanya di kalangan para korban, agar pandangan mereka berubah.

Pembicaraan dilanjutkan oleh Rizal, yang berperawakan gemuk, berpakaian rapi, berkaca mata, berpeci hitam, tampak agak formal dan sopan. Dia kini mengajar di sebuah pesantren. Pada tahun 1965 dia baru berumur 12 tahun. Dia mengatakan tidak banyak mengerti apa yang terjadi,

tetapi dia ingat bahwa hari-hari itu rumahnya memang selalu ramai, sering ada pertemuan di sana. Aktifis Ansor sering berkumpul di rumahnya hari-hari itu. Dia mengatakan baru belakangan dia mengerti apa yang terjadi, tetapi dia tidak menceritakan pemahamannya tentang peristiwa itu. Dia setuju dengan sikap Sutarman yang menyatakan pentingnya menghilangkan dendam di antara berbagai pihak yang terlibat. Segala kesalahan bisa dimaafkan, tidak ada kesalahan abadi yang tidak bisa diperbaiki, apalagi diwariskan hukumannya. Dendam adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan menurut ajaran Islam, dan rekonsiliasi berarti menghapuskan perasaan dendam itu. Karena itu, menurutnya, kegiatan Syarikat adalah usaha yang mulia, yang patut didukung.

Suasana datar itu segera menegang dan terasa beranjak menuju klimaksnya ketika giliran Pak Rauf berbicara. Dia mengaku sebagai salah seorang pelaku dalam apa yang disebutnya sebagai "pembantaian 65". Saat itu dia adalah salah seorang anggota Ansor di Jepara. Dia sendiri berasal dari keluarga sangat miskin di Jepara, dan kemudian dipelihara oleh sebuah keluarga Katholik di Jakarta. Hidupnya enak saat di Jakarta, juga bisa belajar di sekolah yang bagus; namun masalah agama akhirnya mendorong dia kembali ke kampungnya. Di Jepara akhirnya dia menjadi salah seorang aktifis Ansor, dan kelihatannya saat itu dia cukup terkemuka dalam organisasi di tingkat lokal ini.

Hari itu Rauf berpakaian putih-putih, berpeci hitam. Sebelum berbicara, tidak terlihat tanda-tanda bahwa dia pernah menjadi orang yang tega telah membunuh banyak orang. Dia tampak selalu berusaha melihat ke mata orang lain, dan mengajak tersenyum. Tetapi, matanya segera bercahaya saat mengawali pembicaraan. Dia memulai dengan suara bergetar, "Maaf ya, Bapak-bapak, saya ini bisa dikatakan pelaku, pembunuh pada saat itu. Saya terus terang, saya ingin minta maaf".

Rauf lalu menggambarkan awal keterlibatannya dalam aksi pembunuhan itu sebagai peristiwa kebetulan. Dia sedang berjalan kaki ketika melihat konvoi RPKAD lewat. Dia merasa bahwa dalam situasi saat itu orang harus berhati-hati agar tidak dicurigai. Untuk menunjukkan sikap mendukung pihak tentara, sambil mengacungkan kepala tangannya, dia berseru, "Hidup RPKAD! Hidup RPKAD!" Konvoi itu berhenti, dan salah seorang memanggil: "Ayo ikut!". Dia pun ikut rombongan, menuju ke Markas. Inilah awal dari seluruh mimpi buruk itu. Di Markas, pada hari itu juga dia diperintahkan mengikat orang-orang yang sudah tertangkap, pada umumnya orang-orang itu sudah babak belur, susah bergerak, dan tidak dapat bicara lagi. Dia merasa tidak tega melakukannya, menolak, namun sikap ini dibalas dengan pukulan. Akhirnya, dia pun mengikat kelima orang yang sudah tak berdaya itu. Malam harinya, orang-orang itu dinaikkan ke sebuah mobil pick up, dibawa ke Bandengan. Di sebuah jalan yang diterangi lampu teplok,

orang-orang itu diseret turun ke sebuah lobang yang sudah tersedia. Sampai di sini, Rauf menyela ceritanya sendiri, "Ini beneran Pak ya, Bapak yang tersinggung boleh dendam saya, boleh membunuh saya. Saya ikhlas". (Selama bercerita dia berkali-kali menyela ceritanya seperti ini, yang bisa menggambarkan betapa dalam trauma yang dialaminya). Dia disuruh menembak, dia pun menembak. Suara tembakan mengagetkan orang-orang yang tinggal di sekitar lokasi, tetapi cara mereka bereaksi menggambarkan suasana mental umum saat itu. Mereka geger. "Masyarakat Bandengan terkejut, mereka ketakutan dan berteriak-teriak 'PKI ngamuk! PKI ngamuk!' Padahal kitalah yang bunuh PKI itu". Suasana baru tenang setelah pimpinan operasi berpangkat Letnan Kolonel menjelaskan, kerumunan masyarakat itu pun bubar.

Besok harinya dia diminta melakukan hal yang sama, siang hari dia sudah ditunjukkan orang-orang yang akan dihabisi malam nanti. Penangkapan orang-orang itu dilakukan agak sembarangan. Berkali-kali dia menemukan telah terjadi salah tangkap, sehingga nyawa orang yang tidak tahu-menahu melayang juga. Kasus-kasus inilah membuatnya meminta agar diberitahu identitas korban yang lebih jelas, "siapa nama dan nama orang tuanya, supaya nggak keliru bunuh. Soalnya, sudah berkali-kali terjadi salah ambil orang karena namanya mirip. Saya nggak mau bunuh orang nggak salah!", katanya kepada pihak tentara.

Rauf menceritakan 'pekerjaan' ini

berlangsung terus setiap hari selama berbulan-bulan, kecuali selama bulan Ramadhan, tidak ada pembantaian pada bulan itu. Lokasi pembantaianya pun tidak hanya di Bandengan. Tetapi juga di Pelang, dan bahkan di tempat inilah paling banyak orang dibunuh di Jepara. Dia juga menyebut tempat pembantaian lainnya. Korbannya pun tidak selalu berasal dari Jepara. Berkali-kali datang kiriman dari Kudus, kadang-kadang ada perempuan di antaranya. Sampai di sini dia kembali menyela ceritanya, "Ini sejarahnya Pak, maaf ya Pak ya! Saya memang betul-betul pelaksana, tapi dari pengabdian dan karena tekanan dari 0719 (cara dia menyebut Kodim Jepara, pen.)."

Sempat terpikir olehnya dosa atas apa yang dilakukannya. Apalagi, dia menyadari berkali-kali terjadi salah tangkap dan salah bunuh. Merasa sangat tertekan, dia akhirnya *sowan* ke kiai Rahman, seorang kiai NU terkemuka di kota Jepara saat itu.

"Pak kiai, sudahlah ... saya ini dibunuh saja. Tapi saya minta doanya Pak kiai, saya ini ditunjuk jadi pasukan inti. Bagaimana Pak kiai?"

"Sudahlah..., yang penting itu niatnya!", jawab kiai.

"Niatnya bagaimana Pak kiai?"

"Niatnya, membunuh orang yang anti-shalat."

"Ya, *nggak* mesti Pak kiai. Orang PKI ada juga yang shalat".

"Sudahlah! Kerjakan saja. Jangan macam-macam!".

Dia mengaku juga datang kepada tiga orang kiai lainnya dengan keluhan yang

sama. Namun akhirnya dia mengalah, kembali ke 'tugas' itu. Oleh pihak Kodim, dia bahkan ingin dimasukkan dalam Tim Screening, yang bertugas menyeleksi orang-orang yang dicurigai. Dia menggambarkan situasi screening yang sangat keras. Orang-orang yang dicurigai sering dipukuli kalau tidak mau mengaku. Mereka yang dicurigai diinterogasi sambil dijemu di atas seng. Karena itu, dia menolak tugas ini. Penolakannya diterima, tapi dia tidak bisa menolak tugas sebagai pelaksana. Dia mengaku tidak pernah digaji atau diberi honor untuk pekerjaan itu. Namun, setiap kali habis membunuh, dia dijamu makan enak di rumah seorang keturunan Arab yang tinggal di kawasan kota. Sampai di sini, dia kembali menyela ceritanya dan mengatakan ingin meminta maaf kepada para korban. Juga, minta didoakan pada para kiai yang hadir agar dosanya diampuni. "Saya ini orang goblok", katanya. Kali ini suaranya hilang, tersedak oleh tangis yang tertahan.

Sejenak kemudian, Rauf kembali melanjutkan ceritanya. Kali ini tentang pengalamannya saat diperintahkan membunuh seorang kiai yang sudah tertangkap. Namanya, kiai Sarman. Kiai ini konon juga pernah terlibat dalam peristiwa Madiun 1948. Dia merasa sangat ketakutan ketika diminta memanggil sang kiai dari penjara. Namun, kiai itu menerimanya dengan baik. "Ya, *nggak* apa-apa. Ini sudah sejarah", kata kiai Sarman. Dia pun membunuh sang kiai.

Sebelum mengakhiri pembicaraan, dia seperti berusaha menggambarkan

trauma yang dialaminya setelah itu. "Maaf ya, Bapak-Bapak. Maaf. Saya ini seperti paku, maju kalau dipukul dengan palu. Saya betul-betul menyesal, saya tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi". Pak Rauf menangis.

Suasana menjadi hening sebentar. Tapi Muslim segera mempersilahkan peserta selanjutnya. Kali ini kebetulan giliran Syaiful dari Syarikat Yogyakarta. Setelah memperkenalkan diri, Syaiful menceritakan perjalanannya ke Cilacap dan Batang, dalam 2 hari terakhir, dalam acara yang serupa. Dia menceritakan pola-pola konflik yang terjadi di kedua kota itu, juga mencontohkan beberapa temuan investigasi di kota lainnya. "Kesimpulannya", kata Syaiful, "pengalaman yang dialami Pak Rauf, yang menjadi pelaksana itu, pada dasarnya adalah pengalaman yang sama sakitnya dengan apa yang dialami para korban sendiri". Syaiful kemudian bercerita tentang seorang mantan anggota Banser di Jember yang juga terlibat sebagai pelaku. Suatu ketika, saat akan menguburkan orang yang sudah dibunuhnya, pemuda itu menemukan sebuah kartu anggota NU di saku korban. Dia sangat terpuak menyadari telah keliru membunuh orang. Sejak itu, pemuda tersebut mengalami tekanan mental, terus sakit-sakitan, separuh badannya lumpuh hingga sekarang. Dalam hal ini, lanjut Syaiful, status sebagai 'korban' atau 'pelaku' menjadi rancu, karena penderitaan yang dirasakan pelaku justru bisa lebih menyakitkan daripada yang dialami korban.

Syaiful kemudian menekankan pentingnya masing-masing pihak memahami betapa kacaunya situasi saat itu. Suasana politik panas dan menegangkan, berita simpang siur. Dia bercerita baru saja bertemu Kiai Abdullah Faqih, Langitan, Tuban, yang menggambarkan betapa kacaunya situasi saat itu, yang sangat memungkinkan terjadinya salah paham antar-berbagai kelompok masyarakat. Karena itulah, Kiai Faqih berusaha keras menjaga santrinya agar tidak terlibat kekerasan, yang bisa mengorbankan orang yang tidak bersalah. Tetapi yang penting sekarang, kata Syaiful, adalah mencari jalan bagaimana menyelesaikan masalah. Dia memuji kesediaan Pak Rauf menceritakan pengalamannya sendiri. Menurutnya, pengakuan seperti ini akan berdampak ganda, yang akan membantu Pak Rauf mengatasi traumanya sendiri, namun pada saat yang sama juga sangat membantu penyelesaian berbagai masalah akibat peristiwa di masa lalu.

Seusai Syaiful, beberapa anak muda memperkenalkan diri, mereka umumnya adalah aktifis FSAS dan Lakpesdam Jepara. Salah satunya adalah Zarkoni, aktifis muda NU, yang saat peristiwa 65 belum lahir. Namun, dia mengaku peristiwa tersebut membebani dirinya karena, menurut cerita keluarganya, ayahnya saat itu terlibat dalam pasukan seperti Pak Rauf, walaupun hanya pada tingkat desa. Rumahnya menjadi tempat berkumpul anggota Banser. Dengan melibatkan diri dalam aktifitas rekonsiliasi ini, dia berharap bisa mewakili pertobatan ayahnya

yang sekarang sudah meninggal dunia.

Giliran berikutnya adalah seorang pengurus harian PCNU Jepara. Orangnya masih muda. Setelah memperkenalkan diri, dengan hati-hati dia meminta agar kedatangannya lebih dilihat sebagai komitmen pribadi (Dalam percakapan saya dengan aktifis FSAS sebelum acara berlangsung, diceritakan bahwa walaupun pada umumnya pengurus PCNU dapat menerima gagasan ini, mereka umumnya memilih tidak memberikan dukungan resmi karena potensi konflik di kalangan NU dan juga kelompok Islam lainnya. Semua ini merupakan kelanjutan konflik keras yang berlangsung sejak Pemilu 1999, antara pendukung PKB dan PPP, walaupun kedua belah pihak adalah warga NU). Dia mendukung apa yang dikerjakan FSAS dan Syarikat, karena memang ada banyak hal yang perlu diluruskan dalam peristiwa '65. Dia menekankan, gagasan rekonsiliasi ini sebenarnya sejalan dengan keputusan NU dalam Muktamar 1999 di Kediri, yang mendorong diadakannya proses rekonsiliasi, walaupun belum ada kejelasan soal wujud konkretnya. Rekonsiliasi, menurutnya, merupakan ajaran Islam, yang dimuat dalam konsep *ishlah* antar-pihak yang bertikai. Islam sangat menekankan persaudaraan.

Pembicara berikutnya adalah tiga orang petani tua. Mereka berbicara dalam bahasa Jawa Ngoko. Pertama adalah Pak Rasim. "Saya bicara sebentar saja, saya *nggak* biasa *ngomong* banyak", katanya memulai. Dia lahir tahun 1939 di Parisan Geno. Dia dicitiduk saat mengikuti pette-

muan kelompok tani di desanya, dan dikurung selama 17 hari bersama sekitar 200 orang lainnya di Balai Desa. Setelah itu, dia harus lapor ke kantor kecamatan setiap pagi. Dia punya anak 8 orang, penghasilan selalu tidak cukup. "Saya dan teman-teman disuruh kerja bakti terus, miskin saya. Sejak itu hidup saya susah sekali dan menderita sampai 32 tahun. Saya bungkam mulut saya. Yang penting, saya cari nafkah untuk memberi makan anak saya". Dia juga menggambarkan bagaimana stigmatisasi melekat pada orang seperti dia, yang membuatnya mengisolasi diri. Selepas dari tahanan, dia berusaha menyatukan diri kembali dengan masyarakatnya. Tetapi setiap kali dia datang ke suatu perkumpulan, acara perkawinan, atau keramaian lainnya, orang-orang selalu bilang, "*Ono wong PKI teko!* (Ada orang PKI datang!)" "*Saya jadi nggak enak. Bahkan kalau lagi jalan, ada orang bilang, "PKI-ne teko!"* Saya ini miskin, yang penting saya bekerja untuk hidup keluarga". Untuk menjaga ketenteraman hatinya, dia akhirnya memilih menghindar hadir dalam berbagai acara di lingkungannya

Selanjutnya adalah laki-laki tua yang sudah sepuh. Dia hanya berbicara singkat dalam bahasa Jawa kasar, "Saya ini *nggak* bisa *ngomong* model begini. Saya ini petani tulen (*tani bleketuk*). Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan".

"Saya sama dengan mbah Tarno, *tani bleketuk*". Kata Pak Sardi mengawali gilirannya. "Pada waktu kejadian itu, saya digerebek. Ditanyai *dogemen* dan senjata".

Saya jawab, “Yang bawa-bawa senjata itu kan polisi. *Dogemen* itu apa? Saya *nggak* mengerti maksudnya” (Sebagian anak muda tersenyum ketika menyadari bahwa yang dia maksud dengan *dogemen* itu adalah dokumen). Dia dibentak-bentak, beras yang ada di rumahnya diobrak-akrik, kertas-kertas diserakkan. Kemudian orang-orang Ansor menciduknya, dan membawanya ke kota naik truk. Di atas truk, dia masih terus dibentak-bentak, “PKI *kok* *nggak* mengerti *dogemen*. PKI apa ?!!!” sambil ditendang-tendang. “Saya diam saja, pasrah. Saya *nggak* salah, kerja saya cuma pergi ke sawah. Sekian saja. Saya ini *tani bleketuk*”.

Pembicaraan disambung oleh Badri dari desa keling. Orangya masih muda, tetapi selalu kelihatan tegang. Dia berbicara singkat-singkat. Dia mengaku bukan orang PKI, tapi dianggap PKI yang berkhianat terhadap negara. Dia mengaku senang ketika Gus Dur mau menghapus TAP MPRS XXV/66. Dia berharap KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) bisa dilaksanakan sampai tuntas, sampai tahun ‘45, tapi bukan untuk mendendam. Masalah lainnya juga harus dituntaskan. “Saya ini terbawa-bawa. Saya ini anak tokoh PNI kecamatan”. Dia mengaku senang atas adanya pertemuan rekonsiliasi, karena tujuannya baik, dan sudah mengikutinya 2 kali.

Pembicara selanjutnya adalah Mbah Qasim, yang sudah sepuh, tangannya selalu bergetar, suaranya pelan. Dia mengaku hidup dengan membuat kerajinan bambu yang dijualnya sendiri. Dia

tidak berbicara apa-apa tentang kaitan dirinya dengan peristiwa ‘65. Dalam bahasa Jawa kasar, dia pertama-tama minta maaf kalau bicaranya tidak jelas. “Gigi saya sudah habis. Tapi saya ingin menanggapi gagasan yang dibicarakan tadi. Saya cocok dengan gagasan rekonsiliasi (dia mengejanya: REKONSULUASI) itu. *Apik-apikan*, toh maksudnya?” Dia juga setuju saling maaf memaafkan. “Saya ini orang bodoh, orang desa, tapi langsung cocok. Anak-anak kecil juga begitu. Yang penting, semuanya lega!” Penampilan Mbah Qasim memecah suasana siang itu, semua orang yang hadir tertawa menyaksikan caranya berbicara.

Selanjutnya giliran Budi. Dia lahir pada 1963 di kecamatan keling. Dia anak dari seorang yang dinyatakan sebagai PKI. Dia menyatakan senang dengan forum-forum seperti ini, karena berharap dapat mengembalikan nama baik ayahnya. Dia kemudian menceritakan bagaimana susahnya hidup sebagai anak-anak dari orang yang dituduh PKI. Mereka terus-menerus didiskriminasi selama Orde Baru. Susah cari pekerjaan. “Kami sudah dianggap tidak pantas lagi hidup di daerah kami. Bahkan tidak boleh punya harapan. Hidup kami hanya untuk makan. Pendidikan kami juga minim, karena apa gunanya sekolah, kalau tidak ada harapan dapat pekerjaan yang baik di pemerintahan”. Dia menyatakan bisa memberikan maaf kepada orang seperti Pak Rauf, karena baginya Pak Rauf hanyalah korban kambing hitam. Dia berharap rekonsiliasi ini berjalan lancar dan meluas.

ini berjalan lancar dan meluas.

Yang terakhir memperkenalkan diri adalah Bondan. Dia terkena penahanan selama 4 bulan di penjara Jepara. Berkat pembelaan orang-orang Ansor, dia akhirnya bisa dikeluarkan dari penjara. Tapi, setelah itu hidupnya menjadi susah. Dulu dia bekerja sebagai guru. Dia mengaku masih banyak teman-teman senasibnya yang masih hidup; tapi, ketika dihubungi untuk terlibat dalam kegiatan rekonsiliasi seperti ini mereka tidak mau, karena trauma. Mereka takut peristiwa '65 akan terulang kembali. Bahkan, ketika orang-orang YPKP (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 yang didirikan Ibu Sulami, mantan aktifis Gerwani—red.) datang dan berjanji akan memperjuangkan agar mereka mendapatkan santunan, mereka tidak mau. "Mereka benar-benar kapok!". Dia juga mengungkapkan bagaimana dia dan

teman-temannya berkali-kali dirangkul-rangkul saat mau Pemilu, tapi setelah itu dihempaskan lagi. "Setiap kali ada peristiwa, kami dipojok-pojokkan. Contohnya, saat terjadi perusakan Borubudur. Sebelum pelakunya tertangkap, seorang menteri menuduh itu adalah perbuatan PKI. Tapi, yang tertangkap kemudian bukan orang PKI. Tidak ada ralat, apalagi minta maaf. Hal seperti ini terjadi berulang kali". Dia bilang, orang-orang yang senasib dengannya sudah apatis. "Lebih baik memikirkan pekerjaan saja, karena cari uang saja sudah susah. Cari kerja juga susah". Bondan kemudian bercerita pengalaman mengesalkan ketika ingin bekerja di sebuah usaha reparasi radio dan TV. Dia diminta melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB) dari kelurahan, kelurahan memberinya tetapi ternyata SKKB-nya ditulisi "Bekas Tahanan G 30 S". Dia protes, karena ini hanya untuk pekerjaan swasta, tapi aparat bilang hal itu untuk menjaga agar tidak digunakan untuk menyusup. Menurutnya, perlakuan ini benar-benar keterlaluan, karena dia hanya ingin bekerja memperbaiki radio untuk makan.

Bondan membenarkan kekejaman yang diceritakan Pak Rauf, tetapi juga memahami posisi Pak Rauf dalam peristiwa itu, karena "baik Ansor maupun NU tidak akan bisa bergerak, menggrebek atau membunuh, sebelum aparat militer datang. NU dan Ansor itu memang bukan dalangnya. Mereka memang ibarat paku yang dipalu". Karena itu, dia ingin



pelanggar HAM berat. Selebihnya, dia mengharapkan agar rekonsiliasi ini dijabarkan secara jelas siapa pengambil inisiatifnya dan siapa saja yang dilibatkan di dalamnya. Apa tujuannya serta apa manfaatnya bagi kedua belah pihak? Bagaimana realisasinya nanti? Dia mengharapkan agar rekonsiliasi ini berjalan sampai ada perbuatan nyata.

Kini, kembali giliran Muslim berbicara. Dia mencoba menyimpulkan seluruh pembicaraan. Dia menekankan paling tidak ada dua hal pokok yang perlu dirumuskan lebih jauh dalam pembicaraan tahap berikutnya. *Pertama*, bagaimana konsep rekonsiliasi yang bisa disepakati dan siapa yang akan terlibat di dalamnya. *Kedua*, bagaimana merumuskan langkah-langkah konkret yang bisa diupayakan bersama-sama oleh kedua belah pihak di lapangan. Dia juga menawarkan apakah ada peserta yang ingin menawarkan pokok pembicaraan lain untuk dibicarakan, tetapi semua peserta tampaknya sepakat dua agenda itu saja sudah cukup. Acara kemudian diskors untuk makan siang dan shalat. Semuanya ikut shalat, setelah makan bersama, kecuali dua orang yang kebetulan non-Muslim.

Acara dilanjutkan kembali pada jam 14.00. Dimulai dengan pengantar dari Syaiful tentang prinsip-prinsip yang harus disadari oleh masing-masing pihak yang akan terlibat dalam proses rekonsiliasi. Menurutnya, yang paling pokok adalah ketulusan berbagai pihak untuk saling memaafkan dan tekad bersama untuk

tidak mengulangi apa yang telah terjadi. Rekonsiliasi juga mengharuskan adanya semangat persatuan untuk bersama-sama memperjuangkan tujuan rekonsiliasi, mulai dari hal-hal yang paling konkret yang bisa dimulai masing-masing hingga deklarasi politik tingkat nasional kalau situasinya sudah memungkinkan. Saiful berharap ada aksi-aksi konkret untuk penguatan ekonomi bersama, namun dia juga menekankan bahwa kalau hal ini disepakati, maka itu berarti pertemuan semacam ini perlu terus dilanjutkan sampai menemukan bentuk yang paling tepat untuk daerah Jepara.

Syaiful juga menekankan bahwa klarifikasi sejarah tidak boleh ditinggalkan. Baik pada tingkat nasional, yang terutama merupakan tanggung jawab para ahli sejarah, maupun pada tingkat lokal, dengan bersama-sama merevisi ingatan yang hidup dalam komunitas masing-masing dengan cara mengungkapkan pengalaman-pengalaman riil yang seperti terungkap dalam pertemuan hari ini, saling mempertukarkan ingatan antara pihak "korban" dan "pelaku". Misalnya, antara Rauf dan Bondan. Setiap orang punya versi sejarahnya sendiri, yang masih bisa diperdebatkan untuk menemukan apa sebenarnya yang telah terjadi. Proses itu, selanjutnya, bisa diperluas, sehingga dapat mengeliminir banyak kesalah-pahaman yang selama ini terjadi. Syaiful kemudian menyatakan diri berposisi sebagai fasilitator perbincangan kedua itu dan mempersilahkan siapa saja yang ingin berbicara.

Kesempatan pertama disambut oleh

Pak Rujito yang juga berharap agar pertemuan seperti ini bisa terus berlangsung. Dia kembali mengulangi usulnya agar klarifikasi dilakukan hingga ke tingkat bawah. Dia membayangkan adanya Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran (KKR) tingkat kota, atau kecamatan sebagai bentuknya. Dia juga setuju adanya upaya konkret mencari jalan bersama untuk pemberdayaan ekonomi para korban. Gagasan tentang KKR tingkat kota ini disambut baik oleh Bondan, namun dia menambahkan agar biaya pelaksanaannya ditanggung bersama-sama, walaupun seadanya, sebagai wujud keinginan bersama. Pak Rujito menyatakan persetujuannya. Tetapi seorang anak muda NU menyela, dia menginginkan agar tidak terburu-buru. Usulnya tampak lebih realistik, agar misalnya orang-orang seperti Pak Rauf dan Bondan atau Rujito, bersedia memberikan kesaksiannya secara berkeliling ke kiai-kiai terlebih dahulu, sebelum kemudian turun ke tingkat bawah. Pak Rauf menyatakan kesediaannya untuk berkeliling.

Pak Rizal kemudian berbicara dan menyatakan harapannya agar rekonsiliasi ini berdampak pada pemulihan nama baik, baik bagi pelaku maupun korban. Dia berharap dalam jangka panjang langkah ini berpuncak pada pencabutan TAP MPRS/XXV/66. Pada tingkat lokal, dia mengatakan sebenarnya sudah cukup banyak bukti bahwa gagasan seperti ini mungkin dilaksanakan. Dia mencontohkan adanya sejumlah mantan PKI yang sudah diterima oleh masyarakat, setelah

mereka menunjukkan bahwa mereka sudah bertobat, banyak yang sudah berhaji, atau mengikuti tarekat. "Ini membuktikan bahwa dulu mereka hanya ikut-ikutan saja. Jadi, bimbingan para kiai sangat penting. Ini merupakan salah satu pendekatan untuk mengurangi penderitaan mereka", katanya.

Komentar Pak Rizal ini segera memancing Kiai Nuruddin bereaksi. Kiai ini menekankan pentingnya mempertegas prinsip kemanusiaan dalam upaya ini. Dia mengkritik contoh yang dikemukakan Pak Rizal yang menawarkan jalan rekonsiliasi melalui pertobatan, yang mencontohkan orang-orang mantan PKI yang rajin shalat atau bahkan sudah naik haji. "Saya tidak setuju proses rekonsiliasi membatasi kebebasan orang untuk mengikuti keyakinannya sendiri. Mereka harus dibebaskan mengikuti keyakinannya sendiri. Kita harus berhati-hati mengenai orientasi rekonsiliasi ini agar tidak menjadi lembaga misionaris Islam", katanya. Dia juga berusaha mengingatkan bahwa proses rekonsiliasi ini akan memakan waktu panjang. Sebabnya, persepsi negatif kalangan Islam sendiri terhadap PKI, sebagaimana yang dibentuk Orde Baru, masih sangat kuat dan mengakar. Di samping itu, dia mengakui memang ada faktor-faktor konflik antara sebagian kiai dengan PKI, yang kemudian dimanfaatkan tentara dengan cara mengolahnya menjadi konflik antara 'orang beragama' dan 'orang yang tidak beragama'. Kasus kiai Rahman, menurutnya, menunjukkan soal ini dengan sangat jelas.

Selanjutnya, Budi menawarkan sebuah rencana untuk mengundang seorang kiai yang didampingi orang seperti Pak Rauf untuk datang ke desanya yang merupakan 'daerah pemukiman' orang-orang eks-tapol. Mengadakan pertemuan tingkat kecamatan masih belum mungkin, menurutnya. Pak Rauf menyatakan akan bersedia datang kalau ada yang menyelenggarakan pertemuan dan memintanya bersaksi. "Di mana pun saya bersedia. Sekaligus saya ingin minta maaf kepada mereka. Saya tidak pernah bisa tidur nyenyak. Saya berhutang banyak nyawa, Pak!", katanya. Dia pun segera larut dan kembali bercerita tentang kejadian bagaimana dia ditempeleng seorang Letnan, karena menolak menyiksa orang-orang PKI.

Pembicaraan kemudian disambung oleh pengurus harian PCNU. Dia berharap agar pihak-pihak yang hadir menyebarluaskan gagasan-gagasan yang terungkap dalam pertemuan ini ke komunitasnya masing-masing. Dia menyatakan, kalau situasinya sudah memungkinkan, PCNU Jepara akan menyatakan sikap terbuka tentang rekonsiliasi, dengan memberikan instruksi ke tingkat ranting untuk melakukan rekonsiliasi. Tapi saatnya belum sekarang, karena konflik politik di kalangan tokoh di Jepara masih belum terselesaikan.

Pak Rauf kembali minta bicara. Kali ini dia juga usul agar dibentuk koperasi bersama untuk memperkuat silaturahmi sekaligus menolong pihak-pihak yang kesulitan secara ekonomi. Dia menyata-

kan rasa simpatinya pada nasib mbah Qasim, yang menurutnya harus ditolong bersama-sama. Usul ini langsung diamini Pak Rujito.

Setelah tidak ada lagi yang menawarkan usulan tambahan, Syaiful berusaha menegaskan beberapa poin yang kelihatannya bisa dianggap sebagai kesepakatan bersama. *Pertama*, masing-masing pihak bersepakat bahwa peristiwa kejam seperti Tragedi '65 tidak boleh terulang, sehingga seluruh dendam harus dihilangkan. *Kedua*, pentingnya upaya sosialisasi bersama sampai ke tingkat desa-desa dan memperbanyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. *Ketiga*, sosialisasi ke tingkat elite dan rehabilitasi memang penting, tapi juga harus menunggu momentum yang tepat. *Keempat*, rekonsiliasi dalam bentuk kegiatan ekonomi perlu segera dirintis, meskipun kecil-kecilan. *Kelima*, pentingnya mempertegas orientasi rekonsiliasi agar tidak menjadi lembaga misionaris Islam.

Syaiful juga menyatakan perlu adanya pembicaraan lanjutan untuk menggagas bentuk-bentuk konkret yang bisa dikerjakan. Dia menggarisbawahi gagasan Pak Rauf soal membentuk koperasi bersama dan upaya-upaya yang lebih menekankan pada hal-hal yang konkret dan berdampak langsung.

Acara hampir ditutup, ketika Budi mengacungkan jarinya minta kesempatan bicara. Setelah dipersilahkan, Budi menyatakan niat para "korban" untuk menyumbangkan sejumlah uang untuk membantu PCNU yang sedang memperbaiki kantornya, dan meminta pengurus

PCNU yang hadir mau menerimanya sebagai pengikat tali silaturahmi dari "korban" (Belakangan baru saya tahu bahwa mereka merundingkan soal ini ketika makan siang tadi. Uang itu sebagian berasal dari kas iuran mereka). Sumbangan itu diterima, pihak penerima menyatakan bahwa dia sebagai pengurus PCNU menerima tali silaturahmi itu, dan berterima kasih atas niat para korban membantu NU. Namun, dia juga segera menyatakan ingin menyumbangkannya kembali untuk modal merintis usaha ekonomi bersama yang tadi diperbincangkan. Sumbangan diserahkan kembali, mereka berpelukan. Seketika sebuah momen simbolik berlangsung mengharukan. Acara akhirnya ditutup dengan pembacaan doa oleh Pak Rizal. Setelah saling bersalaman, mereka bubar.

Mengapa Rekonsiliasi Kultural ?

Tulisan ini sengaja diawali dengan deskripsi panjang tentang bagaimana proses mediasi berlangsung, karena proses rekonsiliasi kultural yang digagas Syarikat ini lebih merupakan eksperimentasi untuk pencarian model rekonsiliasi yang tepat di dalam situasi yang tidak sepenuhnya ideal. Gagasan melakukan rekonsiliasi ini diakui diilhami pengalaman Afrika Selatan dalam menyelesaikan trauma sosial-politik pasca Apartheid. Namun, disadari ada perbedaan antara kasus Indonesia dan kasus Afrika Selatan. Di Afsel, yang menjadi penguasa kemudian adalah pihak-pihak yang sebelumnya terdiskriminasi, sementara di sini pihak-

pihak korban tetap dalam posisi pinggiran setelah perubahan politik 1998. Kenyataan inilah yang mendorong mereka lebih mengutamakan rekonsiliasi kultural di tingkat akar rumput, bukan rekonsiliasi nasional yang lebih bersifat politis. Mereka menganggap penting adanya usaha-usaha rekonsiliasi politik-hukum berskala nasional, namun pengalaman juga mengajarkan bahwa walaupun akhirnya terjadi rekonsiliasi politik nasional melalui keketetapan atau undang-undang baru, semua itu belum tentu menyelesaikan persoalan diskriminasi pada tingkat riil sehari-hari.

Kesadaran tentang perlunya rekonsiliasi ini sebenarnya sudah lama didiskusikan dalam komunitas ini. Gagasan tersebut bahkan sudah pernah muncul pada pertemuan Kaum Muda NU (KM-NU) di Jakarta pada 1994. Hefner (2000) juga mengungkapkan adanya dorongan kuat di kalangan anak muda NU agar masalah ini dibicarakan secara terbuka. Tetapi baru setelah jatuhnya Soeharto, gagasan ini dianggap mungkin dikerjakan. Pada umumnya disadari bahwa dalam sejarah peristiwa '65 telah terjadi konflik sangat keras antara warga NU dan pendukung PKI di beberapa daerah. Di kalangan muda NU hal ini menjadi semacam beban sejarah yang harus diselesaikan. Mereka juga terdorong melakukannya karena beberapa pertimbangan berikut: Peristiwa '65 adalah tragedi berskala besar baik dalam cakupan area maupun jumlah korbannya; pembunuhan terhadap orang-orang PKI disertai

nuhan terhadap orang-orang PKI disertai dengan stigmatisasi pasca peristiwa terhadap korban, keluarga, dan bahkan keturunannya; corak stigmatisasi itu tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga merembet ke penghilangan hak-hak sipil dan politik secara massif dan berganda; tragedi '65 juga melibatkan kelompok sipil lain sebagai pelaku, terutama umat Islam yang merupakan segmen terbesar bangsa ini, sehingga pembunuhan itu seolah memiliki pembenaran teologis. Gagasan ini juga dianggap relevan bagi pengembangan demokrasi, karena kelompok ini berkeyakinan bahwa demokrasi mustahil dibangun dengan tetap membiarkan adanya eksklusi terhadap kelompok-kelompok tertentu yang hak-hak hukum, politik, dan kulturalnya diingkari. Dengan berbagai pertimbangan inilah, sekelompok anak muda NU membentuk Jaringan Syarikat untuk merintis rekonsiliasi kultural tingkat akar rumput bagi pihak-pihak yang terlibat dalam tragedi tersebut.

Investigasi dan Mediasi

Kerangka kerja sederhana Syarikat adalah berusaha memulai dari hal-hal yang paling mungkin dilakukan meskipun kecil-kecilan. Ada beberapa tahapan kerja yang mereka rencanakan dalam hal ini. Dimulai dengan investigasi mengenai peristiwa itu sendiri. Mereka menyebut investigasi ini sebagai 'riset untuk pembebasan', untuk membedakan pekerjaan mereka dengan riset sejarah lisan yang dilakukan beberapa kelompok lain untuk tujuan ilmiah. Investigasi yang mereka

lakukan juga berbeda dengan investigasi yang dilakukan YPKP yang lebih memusatkan perhatian pada data statistik jumlah orang yang menjadi korban peristiwa '65. Yang ingin mereka lakukan adalah studi sejarah lisan dengan maksud praktis. Sambil melakukan investigasi, mereka mencoba melihat peluang yang memungkinkan untuk proses rekonsiliasi. Mereka mendorong terjadi proses penyembuhan (*healing proses*) dengan mengajak korban atau pelaku menceritakan pengalaman mereka, melakukan advokasi pada tingkat lokal masing-masing, dan berusaha menjalin kembali hubungan-hubungan sosial dengan cara mendekati tokoh-tokoh Islam di daerah masing-masing untuk proses penyadaran bersama, membongkar stigmatisasi dari masing-masing pihak, dan mengembangkan pandangan dan sikap baru yang saling memanusaiakan.

Kegiatan investigasi ini dilakukan di 18 kota di Jawa dengan unsur-unsur jaringan kota sebagai pelaksananya. Sebagai upaya yang memang tidak dimaksudkan untuk tujuan ilmiah, investigasi ini dilakukan untuk menelusuri terbatas pada 3 pertanyaan pokok untuk masing-masing daerah: sebab, proses peristiwa, dan akibat yang ditimbulkannya. Investigasi berlangsung selama satu tahun pertama. Di antara beberapa temuannya adalah betapa tidak berdasarnya generalisasi atas peristiwa itu dan stigmatisasi terhadap orang-orang yang selama ini dianggap terlibat (baik sebagai korban maupun pelaku) di dalamnya. Secara umum dikatakan, sebab-sebab peristiwa tidak



bisa digeneralisasikan sebagaimana selama ini diajarkan dalam buku-buku sejarah resmi. Tapi, paling tidak, sebab ini bisa diklasifikasi dalam tiga hal: perebutan basis material, pengaruh kekuatan supralokal, dan konflik nilai atau ideologi. Namun dalam hal ini pun tidak selalu bisa digeneralisasi untuk masing-masing daerah. Di Cilacap misalnya, dikatakan bahwa kegiatan aksi-sepihak menimbulkan reaksi yang berbeda di satu kecamatan yang sama. Begitu juga soal sikap para kiai terhadap orang-orang komunis saat itu. Misalnya, di Kediri, kota di mana konflik keras antara kiai NU dan santri di satu pihak dengan anggota dan simpatisan PKI di pihak lain terjadi, perbedaan yang menyolok terlihat antara sikap para kiai pesantren Lirboyo dan kiai di Kedung Lo. Pesantren Lirboyo adalah pesantren yang

mengerahkan santri-santrinya untuk menumpas orang-orang PKI karena pihak terakhir ini disinyalir telah menggelar aksi-sepihak dengan menyerang para kiai dan menyerobot tanah-tanah milik kalangan muslim dan kiai. Sebaliknya, pesantren Kedung Lo yang saat itu dipimpin Kiai Ma'ruf digambarkan sebagai pesantren yang menjadi tempat aman di mana ribuan orang-orang PKI mendapat perlindungan (perbedaan sikap ini sebagian menjelaskan ketidakakuran antar-keduanya, di samping perbedaan orientasi fiqh dan tasawuf di antara keduanya). Pesantren Mbah Lim di Klaten memainkan peran sebagai pelindung orang-orang PKI, sebagaimana juga pesantren kiai Abdullah Faqih, Langitan, Tuban. Investigasi ini secara umum juga menunjukkan bahwa kiai yang lebih berorientasi fiqh dan yang terlibat dalam kegiatan politik pada saat itu cenderung menunjukkan sikap yang keras terhadap orang-orang PKI, sementara kiai yang berorientasi tasawuf dan apresiatif terhadap kebudayaan lokal lebih cenderung menjadi pelindung di saat mereka dikejar-kejar.

Pihak-pihak yang berkonflik pun berbeda-beda di masing-masing daerah. Di Cilacap, konflik bermula dari konflik antara dua faksi PNI yang bertikai saat itu, baru kemudian PKI dibawa-bawa, dan provokasi pihak luarlah yang menyeret NU terlibat dalam pusaran konflik pada giliran berikutnya. Di Klaten, konflik berlangsung antara PKI dan Masyumi dengan Kokam Muhammadiyah sebagai pasukan lapangannya, sementara NU

umum jelas bahwa konflik NU-PKI berlangsung keras di banyak tempat, terutama di Jawa Timur, dan GP Ansor terlibat dalam pembunuhan orang-orang yang dituduh terkait PKI, walaupun kemudian umumnya dipahami sebagai kelompok yang dijadikan alat oleh kelompok tentara.

Tahap berikutnya adalah mediasi, memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang pernah bertikai. Sebagian langkah ke arah ini sebenarnya sudah terjadi ketika proses investigasi berlangsung, sambil mempertukarkan versi-versi yang berbeda dari pemahaman masing-masing pihak atas peristiwa. Mediasi dimulai dengan mendatangi pihak-pihak kiai NU dan korban untuk menjelaskan gagasan rekonsiliasi. Proses ini tidak selalu gampang karena stigmatisasi yang sangat kuat di kalangan sebagian kiai. Ada juga keraguan karena pertimbangan politik. Tetapi, pada umumnya, sikap mereka melunak ketika mengetahui ada kiai yang lebih senior yang setuju. Di sisi korban, juga ada keraguan dan rasa takut yang masih kuat kalau-kalau kesedian mereka membuka diri hanya akan menambah kesulitan hidup yang mereka alami saat ini. Tetapi umumnya mereka menyambut baik gagasan ini, karena baru sekarang mereka merasa ada pihak yang mau melihat mereka sebagai manusia bermartabat. Perasaan *dinuwongke* (dimanusiakan) sangat menyentuh mereka, setelah sekian lama merasa dianggap tidak lebih dari sampah. Cerita seorang peserta mediasi di Cilacap berikut ini dengan baik meng-

gambarkan hal ini. Pagi itu seorang lelaki tua bercerita bahwa surat undangan menghadiri acara hari itu adalah surat pertama yang diterimanya setelah selama 32 tahun dia tidak pernah menerima sebuah undangan atas nama dirinya. Selama ini, bahkan rapat RT pun dia tak pernah diajak. Saking senangnya, dia mengaku bahwa sepanjang malam tadi dia tidak bisa tidur, karena takut datang terlambat ke pertemuan pagi itu.

Proses mediasi dilakukan secara bertingkat dengan mempertemukan pihak-pihak yang terkait sejak dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga tingkat propinsi. Mereka yang terlibat dalam proses ini pada dasarnya adalah kalangan NU dan pihak korban, yang tidak terbatas pada mereka yang mengalami peristiwanya secara langsung, tetapi juga beberapa anak keturunan yang masih mengalami akibatnya. Mediasi biasanya dilakukan dengan meminta masing-masing pihak untuk secara terbuka bercerita apa yang dialami dan dilakukan pada saat itu, bagaimana mereka melihat pengalaman itu, dan akhirnya apa yang diinginkan melalui proses mediasi. Mereka kemudian saling menanggapi, menyatakan sikapnya, dan membuat kesepakatan bersama. Umumnya, mereka yang datang adalah mereka yang sudah siap berekonsiliasi; mereka yang tidak bersedia, tidak datang ke pertemuan. Kegiatan mediasi yang berhasil kadang berlanjut pada kerjasama dalam kegiatan konkret yang dianggap berguna secara sosial-ekonomi. Di Blitar Selatan, misalnya, kedua belah

pihak kemudian terlibat dalam kerjasama pemasangan pipa untuk mengalirkan air bersih ke kawasan gersang yang banyak dihuni oleh orang-orang yang dianggap terlibat PKI. Sementara di Blora, seorang pengusaha NU kemudian menawarkan kepada para korban untuk menjadi pekerja di perusahaannya. Sudah umum diketahui bahwa orang-orang yang dianggap terlibat PKI ini mengalami kesulitan mencari pekerjaan akibat stigmatisasi.

Kampanye Publik

Sisi kegiatan lain adalah kampanye publik melalui penerbitan buku, buletin RUAS, dan pertunjukan kesenian. Sasaran kegiatan ini secara garis besar adalah mengevaluasi kembali seluruh konstruksi sejarah mengenai peristiwa '65, mengeliminir stigmatisasi terhadap orang-orang yang terlibat PKI atau yang dianggap demikian, dan membangun jembatan antar-kelompok yang selama ini saling mengeksklusi.

Buku pertama yang diterbitkan adalah otobiografi Hasan Raid, *Pergulatan Seorang Muslim Komunis*. Hasan Raid adalah salah seorang yang telah menjalani hukuman di Nusakambangan. Dia mengaku tidak pernah terlibat, bahkan tidak tahu apa-apa tentang Gerakan 30 September, walaupun dia memang seorang anggota PKI saat itu. Yang ingin dikatakannya melalui buku ini adalah bahwa ia menjadi 'komunis' justru karena keyakinan keislamannya. Melalui suatu interpretasi atas teks-teks al-Qur'an, yang

menurutnya sangat menekankan kepedulian pada nasib rakyat dan keadilan, dia menyatakan bahwa keinginan untuk melaksanakan keyakinan keagamaannya inilah yang mendorongnya memilih bergabung dengan PKI yang memihak rakyat. Buku ini dekonstruktif terhadap persepsi umum di kalangan umat Islam bahkan sejak dari judulnya, di mana identitas sebagai seorang komunis menyatu dengan identitas keislaman. Di samping ditujukan memberikan pemahaman lebih baik mengenai orang-orang yang dianggap bersalah dalam peristiwa G30S, dikatakan juga bahwa maksud penerbitan buku ini adalah menyodorkan sebuah varian interpretasi Islam yang selama ini diabaikan dalam penulisan sejarah Islam di Indonesia. Sebenarnya, interpretasi semacam ini bukanlah pertama kali diungkapkan. Sejak tahun 1920-an interpretasi serupa sudah pernah dikemukakan oleh, di antaranya, Haji Mohammad Misbach dan Haji Batuah; namun, varian Islam ini diabaikan oleh dominasi kategori modernis-tradisionalis yang selama ini dikonstruksikan.

Buku kedua adalah memoar Ahmadi Moestahal berjudul *Dari Gontor ke Pulau Buru* (2002). Moestahal adalah seorang Soekarnois kelahiran Pati, Jawa Tengah. Ia menamatkan pendidikannya di pesantren Gontor, tumbuh besar dalam keluarga santri, dan sangat dekat dengan ketua PBNU KH Idham Chalid. Dia ditangkap karena hubungannya dengan serikat-serikat buruh sebelum meletusnya peristiwa G 30 S, ditangkap dan dipenjarakan

di LP Cipinang dan Nusa Kambangan, hingga akhirnya dibuang ke Pulau Buru tanpa proses hukum. Sebagaimana Raid, dia memilih menjadi bagian dari gerakan partai komunis justru karena keyakinan keagamaannya. Mengenai hal ini dia menulis:

... program partai ini populis, membela buruh, membela orang kecil yang diperlakukan sewenang-wenang Jadi, dalam bahasa Islam ini *kan* membela *madhlumiin* (sic!). Dan memang sejak lulus Sekolah Rakyat (SD) saya bersimpati terhadap gerakan sosialisme-komunis (kiri) seperti PKI. Gerakan kiri sejak sebelum kemerdekaan hingga paska proklamasi menurut saya, gagasan dan substansi programnya mempunyai banyak persamaan dengan ajaran Islam yang saya peluk.

Menerbitkan otobiografi (dengan wataknya yang seringkali subversif) bisa jadi merupakan sebuah strategi tepat untuk melawan sebuah konstruksi sejarah resmi yang tidak memberi peluang atas interpretasi lain, terutama selama upaya rekonstruksi ulang masih harus berhadapan dengan tembok tebal hegemoni negara. Orde Baru bahkan telah melakukan apa yang disebut "naturalisasi sejarah" (*naturalization of history*) dengan sebuah buku putih Gerakan 30 September yang diterbitkan Sekretariat Negara tanpa menyebutkan nama penulisnya (Budiana, 2003). Sebuah buku tanpa pengarang adalah sebuah wacana yang menolak dipersoalkan. Cara paling gampang memahami soal ini barangkali adalah dengan menyandingkannya dengan Kitab

Suci al-Qur'an yang diterbitkan Depag RI, yang juga tidak menyebutkan siapa pengarangnya, yang setiap dibaca harus diakhiri dengan *shadaqa Allah al-Adhîm*". Konstruksi resmi ini juga dikukuhkan dengan berbagai ritual peringatan hari kesaktian Pancasila setiap tahun.

Usaha menghadirkan sejarah alternatif ini jugalah yang mendorong Syarikat menerbitkan memoar Mayjen Pranoto Reksosamudro, seorang Soekarno yang ditugasi menggantikan A. Yani pada saat peristiwa G 30S, namun kemudian dijejalkan ke penjara dengan tuduhan terlibat dalam peristiwa itu. Usaha ke arah yang sama juga dilakukan dengan menerjemahkan dan mempublikasikan bukunya Ben Anderson dan Ruth McVey yang selama Orde Baru dilarang diterbitkan di Indonesia. Bahkan Ben Anderson sendiri selama puluhan tahun dilarang mengunjungi Indonesia konon karena menulis buku tersebut.

Kegiatan kampanye publik juga dilakukan dengan menerbitkan buletin dwibulanan RUAS (Rukun Agawe Santoso) yang dicetak sebanyak 1.500 copy dan sekarang sudah terbit sebelas edisi. Buletin singkat yang disebarkan di kalangan korban dan pesantren ini berusaha menampilkan sisi manusiawi dari kehidupan orang-orang yang dikorbankan dalam peristiwa itu tanpa adanya proses hukum, di samping menawarkan pandangan personal alternatif dari tokoh-tokoh tertentu. Pada umumnya, profil yang ditampilkan adalah orang-orang yang taat beragama, di antaranya adalah

aktifis NU dan Ansor, penginjil, orang yang sama sekali terkait dengan PKI namun menjadi korban, atau anggota Gerwani yang mengaku punya hubungan dekat dengan Muslimat NU dan tidak tahu menahu dengan Gerakan 30 September 1965. Dengan cara ini ingin ditunjukkan bahwa stigmatisasi dan pengucilan terhadap orang-orang yang selama ini dianggap jahat dan ateis seringkali tidak berdasar.

Sarana kampanye lainnya adalah menyelenggarakan pertunjukan kesenian, wayang, ketoprak atau jenis lainnya, sesuai dengan kegemaran penduduk sekitarnya. Di Yogyakarta, seorang sutradara ketoprak menjadi bagian dari proses rekonsiliasi ini. Seniman ini sendiri adalah salah satu dari korban stigmatisasi Orde Baru, karena ibunya adalah anggota Gerwani, dan telah mengalami penderitaan berat karenanya. Di sejumlah tempat (Klaten, Blitar dan Blora) kegiatan seperti ini sangat disukai pihak-pihak yang selama ini merasa terus dipojokkan oleh stigmatisasi dan diskriminasi. Kalangan korban yang kebetulan relatif makmur di kota-kota tersebut bahkan bersedia memberikan dukungan finansial untuk pelaksanaannya.

Sikap Kiai

Kegiatan rekonsiliasi kultural tingkat akar rumput yang digagas anak muda NU ini tergolong kontroversial paling tidak dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, secara doktriner, sejak lama dianut bahwa Islam menolak komunisme sebagai ideologi

yang ateistik dan anti-agama. *Kedua*, sebagaimana telah dikatakan di atas, pada konflik tahun 1965 warga NU dapat dikatakan komunitas yang kental keterlibatannya dalam konflik itu. Karena itu, penting juga melihat reaksi para ulama terhadap kegiatan ini.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sikap ulama NU terhadap kegiatan ini beragam. Yusuf Hasyim (Jombang), Gus Maksum (Kediri), Yusuf Muhammad (Jember), dan beberapa kiai lainnya menyatakan sangat keberatan dengan gagasan melakukan rekonsiliasi dengan kelompok yang mereka anggap sebagai penghianat bangsa dan ateis itu. Sebagian sikap ini boleh jadi juga disebabkan oleh pengalaman buruk terhadap peristiwa itu. Sikap Gus Maksum dari pesantren Lirboyo, Kediri, misalnya, sebagian mungkin harus dijelaskan dengan cara ini., karena masih jelas dalam ingatannya bagaimana ayahnya, yang juga seorang kiai, diseret-seret dari pesantrennya hingga ke markas PKI.

Sikap lebih moderat ditunjukkan oleh para kiai, seperti Kiai Sahal Mahfudz, yang mengambil sikap berhati-hati dengan menyatakan perlunya rehabilitasi hak-hak hukum dan politik mereka dan perlunya rekonsiliasi sosial, tetapi tetap menekankan sikapnya bahwa "sebagai ideologi, komunisme tetap harus ditolak karena menyebarkan ateisme". Ada juga kiai yang semula menolaknya tetapi kemudian berubah sikap setelah beberapa waktu. Salah seorang di antaranya adalah kiai Sulaiman di Blitar. Permintaan agar upaya

Sulaiman di Blitar. Permintaan agar upaya ini tidak terkesan hanya membela orang-orang mantan PKI adalah reaksi paling umum diberikan para kiai yang pada dasarnya setuju dengan gagasan rekonsiliasi, dan para aktifis ini berusaha menunjukkan bahwa sebenarnya orang yang menjadi korban karena dicap PKI itu sebagian adalah warga NU sendiri. Setelah seorang kiai di Banyumas mengemukakan kekhawatiran ini, RUAS menampilkan figur Fauzi yang anggota Ansor, tetapi harus menjalani hukuman berat karena dituduh terlibat PKI tanpa proses pengadilan.

Dukungan dan dorongan semangat didapatkan dari sejumlah kiai senior seperti Kiai Abdullah Faqih (Tuban), Mustofa Bisri (Rembang), Chasbullah Badawi (Cilacap), Zarkasi (Banyuwangi), Syamsuddin (Semarang), Gus Yusuf (Tegalrejo), dan tentu saja Gus Dur. PBNU sendiri tetap bersikap agak kabur. Ketika kelompok ini bertemu dengan Hasyim Muzadi menjelang dimulainya program ini, ketua PBNU ini menyatakan dia setuju gagasan itu sambil menceritakan bahwa dia sendiri sudah berusaha melakukan pendekatan-pendekatan personal kepada kelompok eks-PKI. Dia juga bersedia menyumbang untuk kegiatan seminar "Masa Lalu dan Kemanusiaan" yang mengawali program Syarikat di LIPI pada tahun 2001. Namun, terkesan bahwa dia tidak menunjukkan keinginan memberikan dukungan lebih jauh. Syarikat sendiri pernah meminta PBNU kembali secara resmi meminta maaf atas

apa yang telah terjadi, karena NU-lah organisasi pertama yang secara publik menuntut pembubaran PKI. Dalam sebuah wawancara yang dimuat Tempo (2003), Hasyim Muzadi menolak kegiatan rekonsiliasi ini dengan alasan bahwa dia lebih cenderung melakukan pendekatan yang lebih kultural, namun di situ tidak ada penjelasan apa yang dimaksudkannya dengan pendekatan yang lebih kultural. Beberapa aktifis menduga, bahwa boleh jadi sikap ini harus dibaca sebagai cara PBNU mengelak untuk mengeluarkan sikap resmi. Beberapa pengurus NU di daerah juga menunjukkan sikap yang sama. Seorang pengurus PWNU Jawa Timur, misalnya, menyatakan terus terang bahwa dia tidak bisa memberikan dukungan terbuka kepada Syarikat, walaupun dia sangat mengerti maksud Syarikat dan melihatnya sebagai upaya yang sangat baik. Karena, "saya memikirkan NU", katanya. Tokoh ini kemudian mempersilahkan Syarikat datang kepada beberapa kiai terkemuka di Jawa Timur dan mempersilahkan mereka jalan terus sejauh para kiai itu merestui. Para kiai itu merestui, sehingga Syarikat bisa mengerjakan gagasan mereka di wilayah Jawa Timur.

Kasus Blitar Selatan

Tidak semua orang yang pro-rekonsiliasi melihat positif gagasan rekonsiliasi kultural ini. Sebagian orang bahkan memandangnya berpotensi menghambat upaya besar rekonsiliasi nasional yang diharapkan berdampak luas dan mengantarkan pada rehabilitasi yang tuntas. Soal

tapi ada baiknya kita menoleh ke Blitar Selatan, sebuah daerah di mana ingatan, sejarah, dan pemaknaannya tampak terus-menerus dikontestasikan dengan serius.

Blitar Selatan adalah daerah di mana terjadi konflik keras antara warga NU dan PKI setelah peristiwa 30 September '65. Seperti dituliskan Asvi Warman Adam (2003), selama Orde Baru, daerah ini dianggap "tidak bersih lingkungan". Di situ, penataran P4 dilakukan intensif dua kali sebulan. Sebuah Monumen Trisula telah dibangun untuk memperingati keberhasilan penumpasan PKI pada 1968, namun cerita tentang keganasan tindakan kaum komunis dan bahaya latennya masih selalu di dengung-dengungkan melalui berbagai media. Stigmatisasi terhadap PKI tampak sangat berhasil, dan hal itu membuat upaya menggulirkan gagasan rekonsiliasi di sini tidak mudah, bahkan di kalangan NU sendiri, pada awalnya.

Cerita tentang sikap kiai Sulaiman menggambarkan sebagian tentang hal ini. Kiai ini (meninggal 2003) adalah Ketua PCNU Blitar. Dia anggota Ansor pada masa terjadinya konflik keras dengan orang-orang PKI, walau dia tidak pernah terlibat langsung di dalamnya. Ketika aktifis Syarikat *sowan* ke rumahnya untuk mengutarakan maksud melakukan investigasi dalam rangka rekonsiliasi, kiai ini hanya bisa bertahan tidak lebih 15 menit di kursinya. Dia pergi meninggalkan para aktifis, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Para aktifis itu pulang, agak frustrasi. Namun, mereka memutuskan pelan-pelan

jalan terus, sambil tetap mencari jalan untuk membujuk sang kiai. Usaha mereka akhirnya berhasil juga. Setengah tahun kemudian, ketika para aktifis mengadakan acara dialog dengan para korban peristiwa '65 di Blitar, kiai ini bersedia datang dan menjadi moderatornya. Dia menyatakan setuju dengan upaya tersebut, tetapi menambahkan agar jangan ada kesan kegiatan ini hanya untuk membongkar kesalahan salah satu pihak. Dari dialog itu tergambar bahwa sebelum peristiwa '65, tidak ada ketegangan antara warga NU dan PKI di Blitar. Ketegangan dimulai oleh beredarnya selebaran berisi daftar kiai NU yang hendak dibunuh orang-orang PKI; sebaliknya, di kalangan PKI juga muncul selebaran yang menyebut tokoh-tokoh PKI yang akan dibunuh Banser NU. Masing-masing pihak kini mengaku tidak pernah membuat selebaran itu. Menurut para kiai tua, pembunuhan saat itu terjadi spontan, namun berbagai kasus menunjukkan adanya dorongan dan tekanan militer. Pihak yang terakhir inilah yang dalam kesimpulan dicurigai sebagai penyusun "skenario pemberantasan PKI". Di kalangan NU muncul kesadaran baru bahwa mereka telah diperalat militer untuk menghancurkan PKI. Dialog itu mulai merobohkan tembok pemisah psikologis warga NU dan PKI, dan kegiatan bersama lainnya mulai dirancang.

Puncaknya adalah rekonsiliasi kultural yang dikemas dalam acara pertunjukan kesenian bersama untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad

Saw. Acara itu dikerjakan bersama sejak dari perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaannya. Warga NU menampilkan kesenian Kentrung, sementara kalangan eks-tapol menyuguhkan Campursari. Untuk meletakkannya dalam semesta simbolik Blitar, acara itu diselenggarakan di pelataran Monumen Trisula. Aswi Warman Adam menggambarkan prosesi ini dengan baik:

Di pelataran tugu tersebut, kedua kelompok yang kini duduk berdampingan itu diingatkan kembali akan posisi mereka yang berseberangan pada 1968: Pihak PKI/BTI sebagai target operasi militer, sedangkan pihak NU sebagai pendukung/front belakang operasi tersebut. Selama ini kedua belah pihak memandang monumen itu dengan perasaan traumatis. Tetapi, sekarang melalui pertunjukan kesenian bersama dan dalam situasi psikologis yang berbeda, pemaknaan situs sejarah itu berubah.

Tugu itu telah menjadi saksi rujuk sosial. Dengan demikian sebuah peristiwa baru diciptakan untuk menetralkan ingatan tentang masa lalu yang pahit sekaligus peristiwa yang baru ini direkam dalam memori kolektif bersama. Di sana tidak ada testimoni publik seperti di Afrika Selatan, namun kebenaran telah diungkapkan.

Perlu dicatat, proses rekonsiliasi di Blitar Selatan tidak berhenti di tingkat simbolik, tetapi juga telah merambah ke kegiatan konkret yang dikerjakan bersama. Kedua kelompok ini kemudian bahu-membahu dalam usaha pemasangan pipa air bersih ke kawasan gersang di Blitar Selatan, daerah yang menjadi "pusat

pemukiman" para eks-tapol. Air bersih mulai mengalir membasahi tanah gersang itu, saat luka sejarah lama mulai mengering. Sebuah paradoks yang sempurna!!

Begitu gampang? Dan sudah selesai seluruh proses ini? Jelas tidak. Kejadian berikutnya mengingatkan kita pada nasehat kiai Nuruddin di bagian awal tulisan ini tentang perlunya kehati-hatian dalam menjalankan gagasan rekonsiliasi yang kontroversial ini. Ceritanya bermula ketika pada bulan Mei 2003, Ornop Desantara (Depok) bekerjasama dengan Averroes (Malang) bermaksud mengadakan *Halqah* Kebudayaan tentang "Reinterpretasi Sejarah Peristiwa 65". Dari segi gagasan dasarnya, *Halqah* ini sejalan dengan rekonsiliasi kultural yang dijalankan jaringan Syarikat. Namun mereka tidak menempuh pendekatan yang sama, pelan-pelan mendatangi berbagai pihak dan berusaha tidak terlalu demonstratif. Setelah mereka menyebarkan undangan pertemuan, gagasan ini segera menjadi isu politik. Sepuluh hari sebelum rencana *Halqah*, Kesbang Linmas Kabupaten Blitar mengundang sejumlah Ormas di Blitar. Para undangan tersebut tidak hanya diminta hadir, tetapi juga diharuskan membawa stempel organisasinya masing-masing. Dalam pertemuan itu, Djuruarto, Kepala Kesbang Linmas, mengawali pembicaraan dengan menjelaskan tentang adanya gejala yang mengarah kepada gerakan PKI baru. Dia juga menguraikan apa yang dinyatakannya sebagai sejarah kekejaman gerakan PKI dan, akhirnya, pembicaraan diarahkan pada sikap

menolak rencana *Halqah* tersebut. Ada dua tanggapan yang berbeda. *Pertama*, tanggapan dari KB PII (Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia), Majelis Daerah KAHMI, Majelis Daerah ICMI, PD Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Tapak Suci, BKM (Badan Kesejahteraan Masjid), DPD Hidayatullah, dan Granat (LSM anti-Miras-Narkoba). Mereka tidak hanya mengecam dan menghujat kejahatan PKI dan mengharamkan PKI tumbuh kembali, tetapi juga menyatakan bahwa penggagas *Halqah* itu adalah bagian dari generasi PKI yang berusaha membangkitkan PKI mulai dari Blitar. *Kedua*, tanggapan dari PCNU, GP Ansor, dan Lakpesdam Blitar. Kelompok ini meminta agar hujatan kepada penggagas *Halqah* itu ditunda dulu sebelum meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan. Nampak jelas bahwa segalanya sudah dipersiapkan sebelumnya, Djuriarto segera mengedarkan sebuah surat pernyataan sikap yang sudah diketik. Mereka yang setuju diminta langsung menandatangani dan memberikan stempel organisasi, sementara yang tidak setuju dipersilahkan meninggalkan tempat. Semuanya menandatangani, kecuali kelompok kedua. Bersamaan dengan itu, sebuah organisasi yang bernama Center for Indonesia Communication society (CICS) membagi-bagikan undangan sarasehan "tandingan" yang akan diadakan di desa Dawuhan, Kademangan, Blitar pada 1 Mei 2003, sehari lebih awal dari hari yang direncanakan Desantara.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengarahkan masyarakat untuk menghadiri acara yang difasilitasi Pemda Blitar itu. Akhirnya, sarasehan bertema "Menguak Pelanggaran PKI terhadap Masyarakat dan Aparat Jawa Timur Seputar tahun 1948 dan 1965" berlangsung dengan menghadirkan Kiai Yusuf Hasyim (Jombang) dan Kiai Maksum Jauhari (Kediri). Acara itu dihadiri lebih dari seribu orang. Hadir juga wakil dari PBB dan PAN, serta para korban peristiwa '65. Kelompok yang terakhir ini mengaku dikerahkan dari desa mereka masing-masing. Setelah itu, para peserta sarasehan berpawai keliling kota dengan menggunakan kendaraan dinas yang disediakan. Di jalan-jalan terpampang spanduk berisi sikap anti-komunis atau meminta masyarakat me-"Waspadai Kebangkitan PKI!!" Sangat jelas ada rekayasa pihak aparat dalam hal ini. Namun, cara kerja Desantara dan Averroes seolah telah memberi jalan bagi aksi kontra-rekonsiliasi.

Untunglah ceritanya tidak berakhir di situ. Mungkin inilah *blesing in disguise*-nya. Peristiwa ini ternyata justru memperkuat komitmen PCNU Blitar pada gagasan rekonsiliasi kultural. Melalui rapat kerja Pengurus Cabang NU Blitar yang berlangsung sebulan kemudian, rekonsiliasi kultural ini akhirnya diputuskan menjadi program resmi PCNU Blitar. Demikianlah, gagasan rintisan untuk rekonsiliasi kultural tingkat akar rumput itu akhirnya menemukan kaki dan jalannya sendiri di kota bersejarah ini. ❖